PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAPPERIDA

HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bakti untuk Bangsa

HRP
HAFECS
Research & Publication

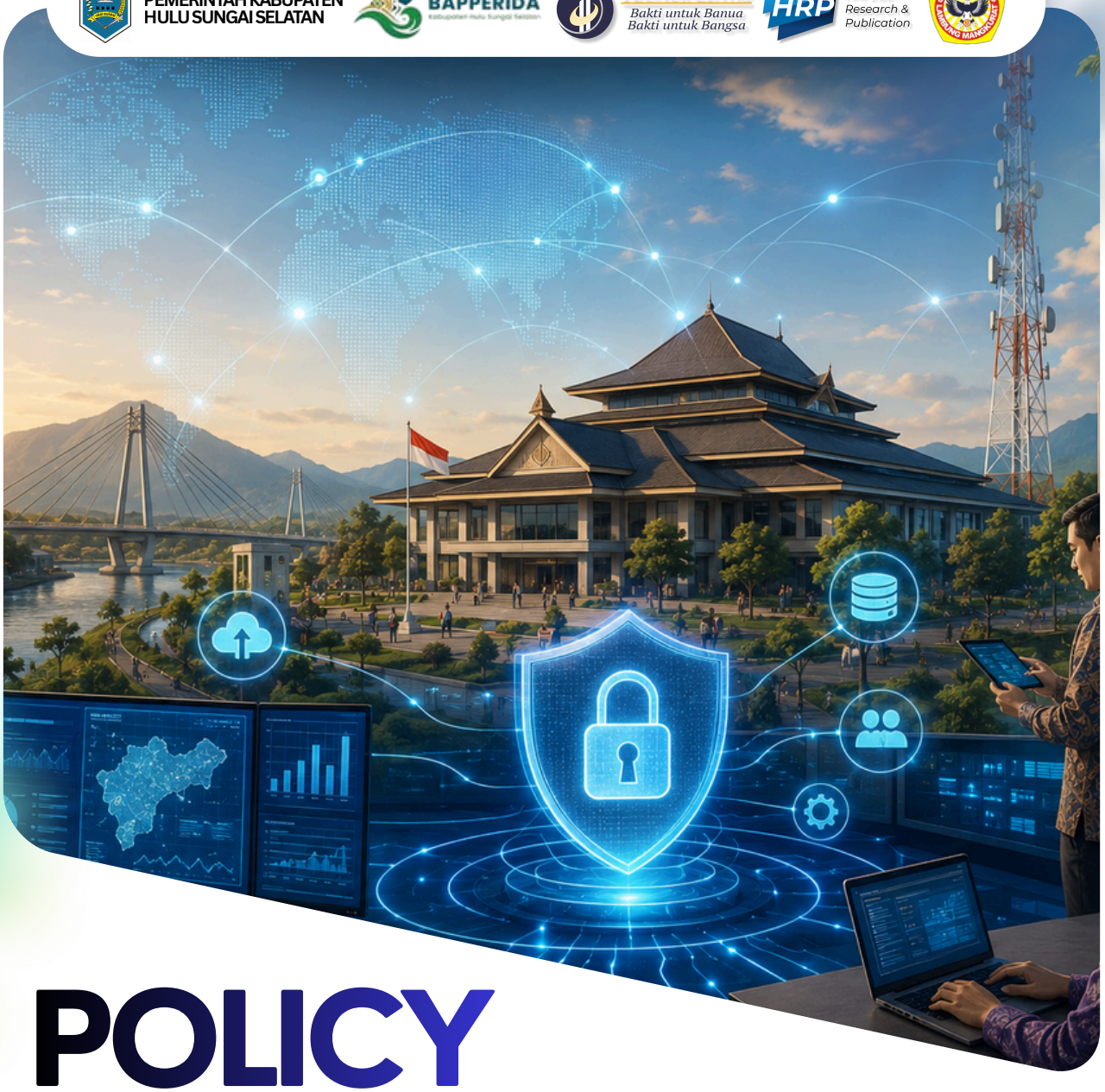

POLICY BRIEF

Tahun 2026

Mewujudkan Tata Kelola Teknologi Informasi yang Aman, Terukur, dan Terintegrasi untuk Percepatan Transformasi Digital di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(Penguatan Fondasi Data, Keamanan Privasi, dan Interkoneksi Sistem)

Penyusun:

1. **M. Fadli Ridhani, S.Kom., M.Kom**
2. **Dr. Muhammad Rahmattullah, M.Pd**
3. **Ellyna Hafizah, M.Pd**
4. **Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc**
5. **Hengky Dwiyan Hermawan, S.Pd., M.IST**
6. **Farida Hayati, S.Pd**
7. **Raihani Raziqin, S.Tr.Kom**

Policy Brief
No: 005/HAFECS-HRP/PB/VIII/2026

Mewujudkan Tata Kelola Teknologi Informasi yang Aman, Terukur, dan Terintegrasi untuk Percepatan Transformasi Digital di Kabupaten Hulu Sungai Selatan *(Penguatan Fondasi Data, Keamanan Privasi, dan Interkoneksi Sistem)*

Ringkasan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah menginisiasi dan mengimplementasikan lebih dari 110 inovasi daerah berbasis teknologi digital. Namun, hasil audit mendalam terhadap 20 inovasi teknologi sampel menunjukkan adanya kesenjangan struktural dan signifikan, khususnya pada kematangan tata kelola teknologi informasi (TI) dan perlindungan data pribadi. Menggunakan kerangka COBIT 2019, rata-rata kapabilitas tata kelola TI masih berada di angka 0,9 dari skala 5, jauh di bawah target standar minimal 3. Kekuatan program saat ini terletak pada kemampuan membangun dan menjalankan aplikasi (skor pemakaian rutin 1,2), namun sangat lemah pada pencatatan aset, pengukuran kinerja, dan keamanan data. Untuk mencegah risiko kebocoran data dan memastikan layanan publik digital yang akuntabel, dokumen ini merekomendasikan tiga langkah strategis: (1) perbaikan cepat fondasi dokumentasi dan tata kelola data; (2) penerapan kebijakan keamanan data dan standar kinerja layanan; serta (3) integrasi sistem dan pencegahan duplikasi aset digital.

Latar Belakang dan Permasalahan

Pemerintah Kabupaten HSS telah menetapkan visi pembangunan "SEMANGAT" dalam RPJMD 2025-2029, yang secara khusus menekankan pilar Teknologis dan Mengayomi. Program digitalisasi menjadi instrumen operasional utama untuk mendukung peningkatan pelayanan publik yang cepat dan transparan, khususnya dalam Asta Cita 4 (Pembangunan SDM & Kesehatan) dan Asta Cita 7 (Reformasi Birokrasi).

Namun, hasil audit terhadap 20 inovasi teknologi prioritas (termasuk 6 aplikasi di RSUD Hasan Basry) mengungkapkan permasalahan mendasar pada dua aspek. Pertama, seluruh aplikasi berjalan tanpa standar tata kelola yang tertulis, menyebabkan ketidakmampuan untuk mengukur kinerja dan mempertanggungjawabkan keandalan layanan. Kedua, 13 dari 20 inovasi mengelola data pribadi warga (data pasien, data anak, data pemohon hibah) tanpa memiliki kebijakan privasi yang transparan dan terdokumentasi, sehingga menyimpan risiko kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Data dan Temuan

Berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap 20 inovasi teknologi sampel audit, teridentifikasi tiga temuan utama sebagai berikut:

1. Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi di Tingkat Inisiatif (Level 0-1):

Menggunakan kerangka standar internasional COBIT 2019, rata-rata kapabilitas tata kelola TI dari 20 inovasi tersebut hanya mencapai 0,9 dari skala 5. Sebanyak 75% atau 15 dari 20 inovasi (termasuk SIPASKA HSS, SIAP, SI HADRAH, dan SIDALI) berada pada kategori C, yang berarti aplikasi berjalan namun hampir tanpa dokumen pendukung, aturan tertulis, atau mekanisme pemantauan yang resmi. Kesenjangan terhadap target Level 3 (Established) mencapai 2,1 level, yang menjadi akar penyebab lemahnya akuntabilitas dan keberlanjutan sistem digital.

2. Ketidaktersediaan Metrik Performa dan Kerentanan Data Pribadi:

Secara agregat, 0 dari 20 inovasi (0%) memublikasikan data performa teknis seperti uptime, response time, atau tingkat kegagalan sistem. Lebih kritis lagi, 13 inovasi yang mengelola data pribadi (seperti SI KOMAR, e-Resep, SIAP, dan ROKET) belum memiliki lembar kebijakan privasi yang dapat diakses publik. Kondisi ini menyebabkan perangkat daerah tidak dapat membuktikan keandalan layanan, sekaligus menempatkan warga pada risiko penyalahgunaan data di luar kewenangan penyelenggara layanan.

3. Duplikasi Aset dan Fragmentasi Sistem yang Meningkatkan Beban Pengguna:

Ditemukan dua kasus duplikasi aset yang kritis. Pertama, SAPA QR tercatat sebagai dua entri terpisah pada dokumen sumber (kesehatan dan birokrasi) meski secara fungsional serupa. Kedua, ROKET (Registrasi Online) dan SI KOMAR (Ketersediaan Kamar) yang keduanya dikelola oleh RSUD Hasan Basry, tidak saling terintegrasi, sehingga pasien dipaksa menginput data yang sama dua kali. Hal ini menurunkan pengalaman pengguna (skor heuristik navigasi rata-rata 3,3 dari 5) dan berisiko menyebabkan inkonsistensi data.

Rekomendasi Strategis

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan menjadikan inovasi digital sebagai pilar pelayanan publik yang andal serta aman, direkomendasikan tiga langkah strategis berikut.

4.1. Penguatan Fondasi Data dan Dokumentasi Tata Kelola (Tahap I)

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu diinstruksikan untuk segera melengkapi data dasar inovasi pada portal SENADA+; mencakup nama penanggung jawab formal, dasar hukum (SK/SOP), dan tahun mulai penerapan. Tindakan administratif ini tidak memerlukan biaya pengembangan, namun akan menaikkan 75% inovasi yang saat ini berada pada Kelompok C (kapabilitas <1,0) ke posisi Kelompok B.

4.2. Penerapan Kebijakan Perlindungan Data dan Standar Performa

Dinas Komunikasi dan Informatika bersama OPD pengampu direkomendasikan untuk merancang dan menerbitkan Kebijakan Privasi standar bagi 13 sistem yang mengelola data pribadi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU PDP. Selain itu, seluruh aplikasi layanan publik wajib menerapkan Target Ambang Layanan (SLA) minimal, dengan target ketersediaan 99% dan waktu respons sistem di bawah 3 detik.

4.3. Penghapusan Duplikasi dan Interkoneksi Sistem Layanan

Pemerintah Daerah melalui RSUD Hasan Basry dan Bagian Umum/Protokol direkomendasikan untuk segera melakukan konsolidasi. Langkah konkretnya adalah:

- Menggabungkan pencatatan aset SAPA QR menjadi satu entri resmi.
- Membangun jembatan data (interface) antara ROKET dan SI KOMAR agar pasien cukup mengisi data sekali untuk mendapatkan nomor registrasi sekaligus informasi ketersediaan kamar secara real-time.
- Menetapkan SILAKSA tidak hanya sebagai portal tautan, tetapi sebagai gerbang antarmuka pemrograman (API Gateway) terpusat untuk menghubungkan sistem-sistem yang ada.

Tahapan Implementasi

Agar rekomendasi tersebut dapat diwujudkan secara sistematis, implementasi kebijakan direkomendasikan dilaksanakan dalam tiga tahapan.

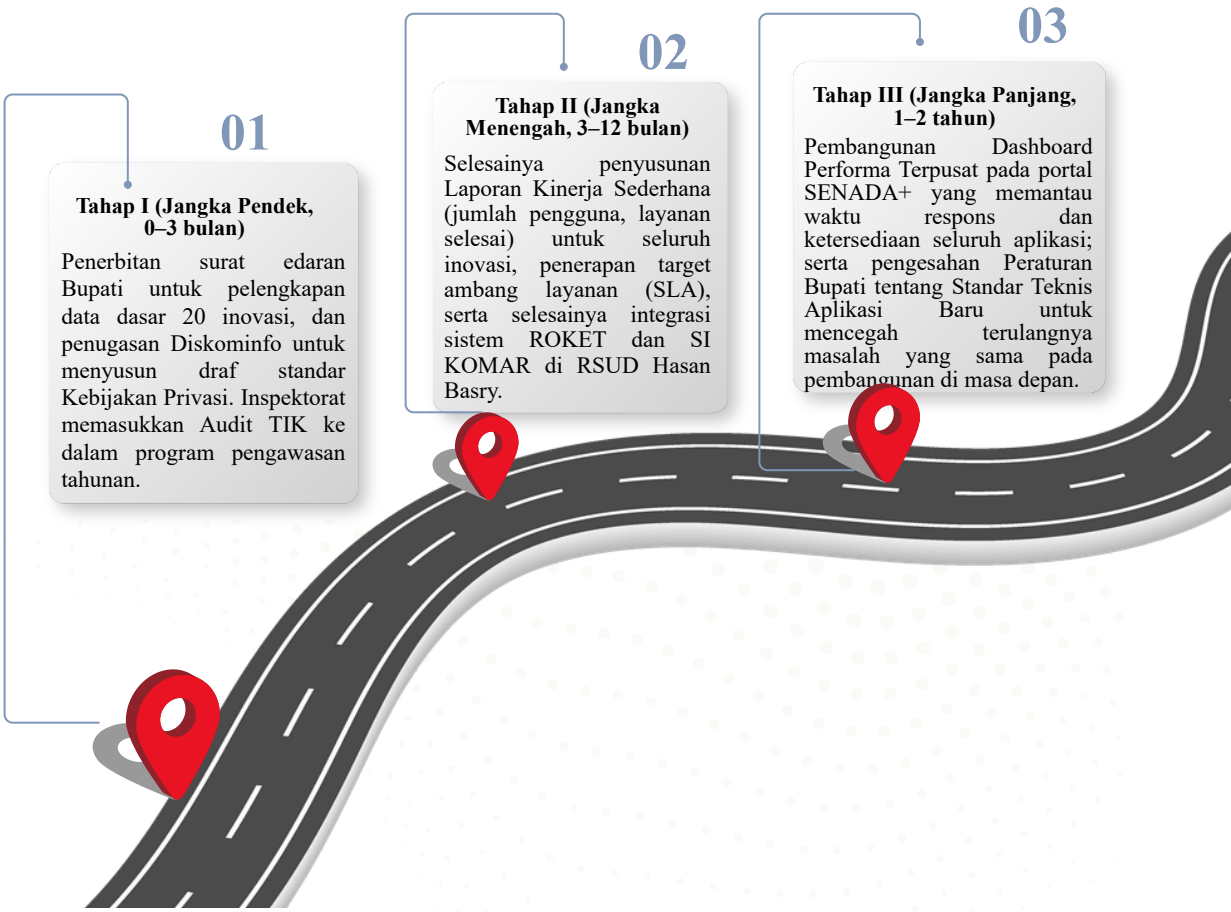

Penutup

Pencapaian transformasi digital yang aman dan berorientasi pengguna tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana aplikasi tersebut tercatat, terukur, dan terlindungi. Kabupaten HSS telah memiliki fondasi yang kuat dalam produksi produk digital, namun saat ini membutuhkan restrukturisasi kebijakan tata kelola untuk menciptakan ekosistem TI yang saling terhubung, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten HSS tidak perlu lagi menambah 100 aplikasi baru; langkah prioritas yang paling mendesak adalah menginstruksikan Bapperida dan Diskominfo untuk segera merapikan fondasi data yang ada, agar inovasi digital yang telah dijalankan bertransformasi menjadi layanan publik yang benar-benar melindungi warga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.